

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 yang dibuat ini akan mampu memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup pemanfaatannya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah – kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat memberikan gambaran penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikenal saat ini pada mulanya tahun 2003 disebut Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda)

---

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 15 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 06 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Perbub No. 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 1.2.Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan :

- 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) "pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi : Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan" pasal 71 ayat(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 'menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional",
  - 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
-

3. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3838)
  4. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3853)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4161)
  7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4585)
  8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang pedoman pembagian urusan Antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737)
  9. Peraturan pemerintah No 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4815)
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang pedoman pengaduan kasus pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup.
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang petunjuk Teknis Standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
  12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 Tentang pedoman penentuan status Mutu Air.
-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47);

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bertujuan sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dan tersusunnya Dokumen perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan , program yang lebih terarah, efektif dan efisien.
  - 2) Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 2019 atau sumber dana lainnya.
  - 3) Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang.
-

- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam sertaterwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat,dunia usaha, serta pemerintah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Landasan Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sistematika Penulisan
  
  - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
    - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
    - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
    - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
    - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
    - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
  - BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
    - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
    - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
    - 3.3 Program dan Kegiatan
  
  - BAB IV PENUTUP
-

















### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih dikota kuala tungkal. Terlihat dari data volume sampah yang dari tahun ketahun selalu meningkat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja 2011 - 2015 volume sampah dikota kuala tungkal mencapai 10.800 m<sup>3</sup> -18.000m<sup>3</sup>. selain itu kurangnya perhatian dan pengetahuan penanganan oleh masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik dan rumah tangga.
  2. Pertumbuhan pemukiman yang tinggi terutama didaerah perkotaan Kuala Tungkal sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena diakibatkan aktivitas ekonomi dan pemerintahan, menyebabkan pemukiman didaerah ini menjadi semakin padat. Hal ini memacu peningkatan permintaan lahan dan daya dukung lingkungan untuk pemukiman atau perumahan, keterbatasan lahan di Kecamatan Tungkal Ilir khususnya Kota Kuala Tungkal yang berada di daerah dataran rendah merupakan daerah genangan air, Tidak sedikit areal bantaran sungai yang dijadikan tempat pemukiman yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan sungai, ini menjadi salah satu penyebab banjir atau naiknya air laut melimpah ke jalan ketika terjadi pasang besar (rob) pada bulan – bulan tertentu.
-













## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. a. Penyediaan Sarana dan	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	1 Kegiatan	

---

	<p>Prasarana Persampahan</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas Akses informasi dan sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.</p> <p>-Identifikasi Sumber Daya Alam dan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjab Barat</p>	<p>-Bacholder</p> <p>-Excapator</p> <p>-Mobil Penghisap Debu</p> <p>-Truk Pengangkut Sampah</p> <p>-Jalan Masuk TPA</p> <p>-Kendaraan Roda 4 (Double Gardan)</p> <p>-Computer 1 pa</p> <p>-Meja 1 biro 1 Set</p> <p>-Lemari Besi (Filling Kabinet)</p> <p>-Lemari Rak</p> <p>-Camera Digital</p> <p>-Rehab ringan Pos Pengadaan</p>	<p>1 Unit</p> <p>2 Buah</p> <p>4 Set</p> <p>2 Buah</p> <p>1 Buah</p> <p>1 Buah</p>	<p>1 Buah Untuk Kec. Tungkal ulu</p> <p>1 Buah Untuk Kec. Tungkal Ulu</p>
--	---	---	--	---	--

--	--	--	--	--	--

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

---

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan open access yang tidak terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain: a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil ; b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerjasama antar wilayah administrasi belum kuat; c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi; d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek; e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

- a) Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  
Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan
-

transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.

- b) Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi secara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaiki kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership LH yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).
- c) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA) SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi
-

beberapa jenis ikan. untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.

- d) Perlindungan dan pemulihan daya dukung. Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.
- e) Pengendalian beban lingkungan hidup. Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.
- f) Kebijakan Penegakan hukum. Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan. Kapasitas yustisia dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 – 2021, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017 – 2021 adalah :

---



Tujuan :

- 1.Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dibidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjawab tantangan serta isu global tentang lingkungan hidup.
- 2.Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 3.Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan
- 4.Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis :

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran – sasaran strategis yaitu :

- 1)Terkelolanya Sumber Daya Alam dan fungsi Lingkungan Hidup Secara Baik.
  - 2)Terpeliharanya Kualitas Sumber Daya Air , Tanah dan Udara.
  - 3)Terwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
  - 4)Terlindungnya Kelestarian Keragaman Hayati.
  - 5)Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat.
-

### 3.3 Program dan Kegiatan Untuk Tahun 2018

Untuk Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja Tahun 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Pelayanan administrasi Perkantoran								
	a. Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya belanja perangko, materai, benda pos, dan pengiriman surat	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	4.000.000	APBD Kab			
	b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya telepon, air, dan aliran listrik	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	70.000.000	APBD Kab			
	c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya honorarium panitia pelaksana kegiatan administrasi keuangan	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	110.000.000	APBD Kab			
	d. penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat – alat kebersihan kantor	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	9.000.000	APBD Kab			
	e. penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	75.000.000	APBD Kab			
	f. penyediaan Kompenen Listrik dan penerangan bangunan Kantor	Tersedianya kompenen Listrik dan penerangan bangunan Kantor	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	6.000.000	APBD Kab			
	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	6.500.000	APBD Kab			
	h. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terpenuhinya Jaminan petugas kebersihan	Kab.Tanjab Barat / Luar Daerah	12 bulan	182.000.000	APBD Kab			

			i. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan Luar daerah	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	290.000.000	APBD Kab			
			II. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur								
			a. Pembangunan Gedung Laboratorium	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan gedung Laboratorium	LH Kab.Tanjab Barat	1 Unit	7 5.000.000	APDB Kab			
			b. Pembangunan Sekretariat Program kampung iklim (Proklim)	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan gedung Laboratorium	LH Kab.Tanjab Barat	1 Unit	270.000.000	APDB Kab			
			c. Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya belanja, computer, ac, laptop, CCTV, penghancur kertas dan belanja lainnya.	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	90.000.000	APBD Kab			
			d. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Terlaksananya belanja Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	LH Kab.Tanjab Barat	6 Unit	120.000.000	APBD Kab			
			e. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	LH Kab.Tanjab Barat	1 gedung 1 Penjaga	16.000.000	APBD Kab			
			f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Oprasional	LH Kab.Tanjab Barat	36 unit kendaraan	1.400.000.000	APBD Kab			
			g. Pemeliharaan rutin peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan mesin tik, computer, ac, laptop, dan TV	LH Kab.Tanjab Barat	45 unit peralatan	20.000.000	APBD Kab			
			H. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kebersihan	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Kebersihan	LH Kab.Tanjab Barat	74 unit peralatan	25.000.000	APBD Kab			
			III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
			a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian dinas sebanyak 71 stel	LH Kab.Tanjab Barat	71 stel	35.00.000	APBD Kab			

			b. Pengadaan pakaian Kerja lapangan	Terlaksananya Pengadaan pakaian Kerja lapangan	LH Kab. Tanjab Barat	160 set	100.000.000	APBD Kab			
			IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			a. Penyusunan laporan - laporan	Tersusunnya laporan akhir tahun	LH Kab. Tanjab Barat	16 laporan	49.000.000	APBD Kab.			
			V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.								
			a. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelola persampahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pada masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Tanjab Barat	2 kali Sosialisasi	7000.000	APBD Kab			
			b. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya pembangunan Gedung pengelolaan sampah/ bank sampah/ penyedia peralatan pengolah sampah	Kab. Tanjab Barat	100%	240.000.000	APBD Kab			
			c. Peningkatan fungsi sungai dan drainase	Terpeliharanya kebersihan sungai dan drainase	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	176.850.000	APBD Kab			
			d. Oprasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pengawasan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir	Kab. Tanjab Barat	1 Lokasi	163.700.000	APBD Kab			
			e. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	1.905.160.000	APBD Kab			
			f. Pembuatan Biogas	Terlaksannya pembuatan biogas dari kotoran ternak atau samapah	Kab. Tanjab Barat	100%	75.000.000	APBD Kab			
			VI. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup								

			a. Penataan hukum lingkungan	Pengawasan dan pembinaan dunia usaha pada peraturan perundangan – undangan lingkungan	Kab.Tanjab Barat	55 dunia usaha	110.000.000	APBD Kab			
			b.Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 - Pembinaan usaha skala kecil penghasil limbah B3	Kab. Tanjab Barat	100	115.000.000	APBD Kab	-		
			c. pengkajian Dampak Lingkungan	-Kegiatan implementasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) -Penyusunan dokumen neraca sumber daya alam	Kab.Tanjab Barat	Laporan RKL-RPL 50 perusahaan, Dokumen SLHD, Dokumen Neraca lingkungan hidup	68.250.000	APBD kab	-		
			d. Kordinasi Penilaian kota sehat /adipura	Terlaksananya kordinasi persiapan pemantauan adipura, sosialisasi proklam dan sosialisasi kalpataru	Kab. Tanjab Barat	32 titik pantau adipura, pembinaan proklam dan 1 kali sosialisasi	145.000.000	APBD kab			
			e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kualitas SDA dan lingkungan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi adipura kegiatan lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM)	Kab. Tanjab Barat	3 Kegiatan	145.000.000	APBD kab			
			f. Peningkatan kapasitas SDM Pengendalian Lingkungan Hidup.	Terlaksana sosialisasi pengawasan pengendalian lingkungan hidup ( Limbah b3. Proper dan sipil, IPAL, LA, Penanganan kasus lingkungan dan implementasi peraturan perundang -undangan	Kab. Tanjab Barat	3 Kali Sosialisasi	65.000.000	APBD kab			
			VII.Program Perlindungan Dan Konsevasi sumber daya Alam								
			a. Pemantauan Kualitas Badan air Sungai	Pengujian limbah cair perusahaan dan kualitas air sungai	Kab.Tanjab Barat	18 perusahaan, 10 sungai, 2 pesisir	149.872.952	APBD kab			
			b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri	terlaksananya pengujian emisi/polusi pada perusahaan	Kab.Tanjab Barat	14 perusahaan	85.008.008	APBD kab			
			c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kulaitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	terlaksananya kegiatan sosialisasi adiwiyata, kegiatan lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM)	Kab.Tanjab Barat	3 Kegiatan	136.800.000	APBD kab			

			VIII. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi dan Sumber Daya Alam Lingkungan							
			a. Penyusunan SLHD dan Neraca SDA	Penyusunan SLHD dan Neraca SDA	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	87.750.000	APBD Kab.		
			b. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup	Meningkatnya pengetahuan dan akses masyarakat memberikan informasi terkait kerusakan lingkungan	Kab. Tanjab Barat	3 kegiatan	119.460.000	APBD kab		
			c. Peringatan HLH Sedunia dan Pekan Pameran Lingkungan Hidup	Tumbuhnya motivasi masyarakat tentang Pengelolaan lingkungan	Kab. Tanjab Barat	2 Kegiatan	219.100.000	APBD Kab		
							6.735.069.421			

Kuala Tungkal, Juli 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SUPARJO. SE  
NIP.19680116 199703 1 002

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017- 2021.

Rencana Kerja tahunan ini memuat program – program dan kegiatan – kegiatan untuk mencapai sasaran strategis , dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 inidiharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan – tantangan dan permasalahan lingkungan hidup kedepanya terutama di tahun 2020 mendatang.

---

## KATA PENPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 yang memuat tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Rencana Setrategis SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017- 2021. Sehubungan dengan itu. Maka di susunlah suatu Rancangan Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Demikianlah Rancangan Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dibuat. Namun kami masih menyadari bahwa dalam penyusunan rancangan rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Kuala Tungkal, Juli 2017

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO. SE  
Pembina  
NIP. 19680116 199703 1 002

---



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian kinerja .....	5
Tabel 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	9
Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	11
Tabel 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2018.....	19

---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian kinerja .....	5
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD .....	9
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD .....	10
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD .....	11
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>16</b>
3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional .....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	18
3.3. Program dan Kegiatan tahun 2019.....	19
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>24</b>

---



